

## **TOLERANSI DAN INKLUSI DALAM SISTEM KEUANGAN** *Sebuah Upaya Menumbuhkan Ekonomi Berkelanjutan*

**Sofiandi**

Institute Agama Islam Arrisalah – INHIL, Riau  
email: [sofiandi88@gmail.com](mailto:sofiandi88@gmail.com)

**Nur Hasanah**

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau  
email: [nur.hasanah@uin-suska.ac.id](mailto:nur.hasanah@uin-suska.ac.id)

**Zulkifli M. Nuh**

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau  
email: [zulkifli.mnub@uin-suska.ac.id](mailto:zulkifli.mnub@uin-suska.ac.id)

**Rhonny Riansyah**

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau  
email: [rhonny.riansyah@uin-suska.ac.id](mailto:rhonny.riansyah@uin-suska.ac.id)

### **ABSTRAK**

*Artikel ini membahas peran inklusi dan toleransi dalam system keuangan sebagai upaya mewujudkan pertumbuhannya ekonomi yang berkelanjutan. Dalam era globalisasi dan kompleksitas ekonomi saat ini, inklusi keuangan telah menjadi fokus penting dalam upaya meningkatkan aksesibilitas dan partisipasi masyarakat dalam sistem keuangan. Selain itu, toleransi juga diakui sebagai faktor kunci dalam menciptakan lingkungan keuangan yang inklusif, di mana nilai-nilai budaya yang beragam dihormati dan diintegrasikan. Hasil penelitian yang bersifat studi pustaka ini menunjukkan bahwa inklusi dan toleransi dalam system keuangan sangat bermanfaat bagi pertumbuhan ekonomi termasuk stabilitas keuangan, peningkatan inovasi dan kreativitas ekonomi, pemerataan akses layanan keuangan serta berujung kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan dan berkelanjutan.*

**Kata kunci;** *Toleransi, Inklusi Keuangan, Ekonomi berkelanjutan*

### **Pendahuluan**

Istilah inklusi keuangan menjadi tren setelah krisis 2008, sebagian besar didasarkan pada dampak krisis terhadap kelompok berpenghasilan rendah dan informal, masyarakat yang tinggal di daerah terpencil, penyandang disabilitas, pekerja tanpa dokumen resmi dan masyarakat terpinggirkan yang umumnya unbanked. Kelompok ini sangat besar, terutama di luar negara maju. Pada KTT G20 Pittsburgh 2009, anggota G20 menyepakati perlunya peningkatan akses keuangan untuk kelompok ini, yang kembali diperkuat pada KTT Toronto 2010 dengan merilis 9 prinsip inklusi keuangan inovatif sebagai panduan untuk mengembangkan inklusi dalam sistem keuangan. Prinsip-prinsip tersebut adalah

kepemimpinan, toleransi-keragaman, inovasi, perlindungan, pemberdayaan, kolaborasi, pengetahuan, proporsionalitas, dan kerangka kerja.

Terkait dengan prinsip-prinsip inklusi keuangan ini, prinsip toleransi menjadi menarik untuk dibahas karena dianggap sebagai bagian dari akar permasalahan yang kerap muncul di negara-negara berkembang. Di lain sisi, perkembangan yang berkelanjutan dalam bidang keuangan sangat penting bagi negara-negara berkembang untuk menumbuhkan kekuatan ekonomi mereka. Oleh karena itu, penegakan prinsip toleransi menjadi starting point dalam pegerakan ekonomi yang masif, melalui sistem keuangan yang baik, untuk kesejahteraan yang merata bagi seluruh masyarakat.

Sistem keuangan yang inklusif dan didasarkan pada prinsip toleransi memiliki potensi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif. Inklusi keuangan mengacu pada akses yang adil dan merata terhadap produk dan layanan keuangan bagi semua individu dan kelompok dalam masyarakat, termasuk mereka yang sebelumnya tidak terjangkau oleh sistem keuangan konvensional. Menurut Demircuc-Kunt, Klapper, Singer, & Van Oudheusden (2015) inklusi keuangan menjadi faktor kunci dalam pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Mereka menemukan bahwa akses yang adil dan merata terhadap layanan keuangan dapat meningkatkan produktivitas, mengurangi ketimpangan, dan membuka peluang ekonomi bagi individu dan komunitas yang sebelumnya tidak terlayani.

Toleransi, di sisi lain, melibatkan penghargaan terhadap perbedaan dan keberagaman dalam konteks ekonomi, memungkinkan kerjasama yang saling menguntungkan dan inklusif di antara berbagai kelompok masyarakat.

Dalam era globalisasi dan kompleksitas ekonomi yang semakin meningkat, penting untuk memahami bagaimana inklusi dan toleransi dalam sistem keuangan dapat memainkan peran penting dalam mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Meneliti dan menganalisis hubungan antara inklusi keuangan dan toleransi dapat memberikan wawasan yang berharga untuk pengambilan keputusan kebijakan dan praktik yang bertujuan untuk menciptakan sistem keuangan yang lebih inklusif dan toleran.

Menariknya lagi, menurut penelitian Hassan, Sanchez, & Yu (2019) ditemukan bahwa keyakinan keagamaan memiliki hubungan yang signifikan dengan inklusi dalam sistem keuangan. Penelitian mereka menggunakan data dari World Values Survey dan menunjukkan bahwa individu yang memiliki keyakinan keagamaan yang kuat cenderung lebih cenderung untuk menggunakan layanan keuangan formal dan memiliki akses yang lebih baik ke produk keuangan. Temuan ini mengindikasikan bahwa faktor-faktor keagamaan memainkan peran penting dalam membentuk inklusi keuangan di masyarakat.

Dalam dimensi yang lebih luas, menarik untuk disimak sebuah penelitian yang telah dilakukan oleh Lucey dan Zhang (2020) dalam artikel "Does Tolerance to Other Religions Stimulate Foreign Direct Investment? Evidence from Muslim Countries" yang diterbitkan dalam Journal of International Money and Finance. Penelitian tersebut menyediakan bukti yang menarik mengenai hubungan antara toleransi terhadap agama-agama lain dengan investasi langsung asing (Foreign Direct Investment, FDI). Penelitian ini terutama berfokus pada negara-negara Muslim dan menunjukkan bahwa tingkat toleransi yang lebih tinggi terhadap agama-agama lain dapat merangsang FDI. Temuan ini memberikan wawasan yang penting dalam konteks inklusi dan toleransi dalam sistem keuangan, menunjukkan bahwa aspek sosial dan budaya juga memiliki peran dalam menarik investasi asing dan

mempengaruhi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dengan merujuk pada penelitian ini, kita dapat memperluas pemahaman kita tentang pentingnya inklusi dan toleransi dalam sistem keuangan sebagai faktor yang mempengaruhi tidak hanya akses ke layanan keuangan, tetapi juga investasi dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Terlepas dari fakta empiris tersebut, yang tak kalah penting adalah isu-isu yang terkait dengan regulasi dan pengawasan perbankan. Bahwa regulasi dan pengawasan perbankan yang efektif sangat penting dalam upaya mencapai inklusi dan toleransi dalam sistem keuangan. Laporan Global Financial Development Report 2019/2020 yang diterbitkan oleh World Bank Group, yang berjudul "Bank Regulation and Supervision a Decade after the Global Financial Crisis", mengungkapkan pentingnya hal tersebut. Laporan ini memberikan wawasan mendalam tentang upaya regulasi dan pengawasan perbankan pasca krisis keuangan global serta dampaknya terhadap stabilitas sistem keuangan dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Laporan ini juga memberikan kerangka kerja yang berharga untuk mengeksplorasi dampak kebijakan perbankan terhadap akses ke layanan keuangan dan partisipasi ekonomi yang merata (World Bank, 2019).

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji peran inklusi dan toleransi dalam sistem keuangan dalam konteks pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Penelitian ini akan menganalisis dampak inklusi keuangan dan toleransi terhadap stabilitas ekonomi, kepercayaan dalam sistem keuangan, inovasi, dan kreativitas ekonomi. Selain itu, penelitian ini juga akan mengidentifikasi tantangan dan hambatan dalam mewujudkan inklusi dan toleransi dalam sistem keuangan serta mengeksplorasi praktik terbaik dan studi kasus yang berhasil dalam mencapai tujuan tersebut.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Hasil penelitian ini dapat mencakup temuan-temuan penting yang mendukung pemahaman kita tentang hubungan antara inklusi, toleransi, dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Secara terperinci, hasil penelitian dapat mencakup hal-hal berikut:

Pertama, terkait dengan hubungan antara inklusi keuangan dan pertumbuhan ekonomi, penelitian telah menunjukkan bahwa inklusi keuangan, yaitu akses yang luas dan adanya partisipasi masyarakat dalam layanan keuangan, memiliki dampak positif pada pertumbuhan ekonomi. Inklusi keuangan dapat memperluas akses ke modal, meningkatkan produktivitas, dan mempromosikan kewirausahaan, yang pada gilirannya berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Kedua, terkait dengan peran toleransi dalam sistem keuangan, bahwa toleransi, baik dalam konteks agama, budaya, maupun sosial, dapat memainkan peran penting dalam membangun sistem keuangan yang inklusif dan berkelanjutan. Penelitian menunjukkan bahwa tingkat toleransi yang tinggi dapat menciptakan lingkungan yang kondusif bagi partisipasi ekonomi yang merata, investasi, inovasi, dan stabilitas dalam sistem keuangan.

Ketiga, terkait dengan dampak regulasi dan kebijakan, bahwa regulasi dan kebijakan yang memperkuat inklusi dan toleransi dalam sistem keuangan memiliki implikasi yang signifikan. Penelitian menunjukkan bahwa kebijakan inklusif yang mendukung akses ke layanan keuangan, melindungi hak-hak konsumen, dan mendorong inovasi teknologi keuangan dapat memperkuat inklusi dan menciptakan lingkungan yang lebih toleran dalam sistem keuangan.

Keempat, terkait dengan tantangan dan peluang, bahwa penelitian ini juga mengidentifikasi tantangan dan hambatan yang perlu diatasi dalam mewujudkan inklusi dan toleransi dalam sistem keuangan. Ketimpangan akses ke layanan keuangan, diskriminasi, regulasi yang tidak memadai, serta kendala budaya dan sosial merupakan beberapa tantangan yang perlu diatasi. Namun, dengan mengatasi tantangan ini, terdapat peluang besar untuk menciptakan sistem keuangan yang lebih inklusif, toleran, dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Terhadap empat poin yang dihasilkan dari penelitian ini, yang harus digarisbawahi adalah pentingnya memperkuat inklusi dan toleransi dalam sistem keuangan sebagai elemen kunci dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dengan memahami hubungan yang kompleks antara inklusi, toleransi, dan pertumbuhan ekonomi, kita dapat mengidentifikasi kebijakan dan praktik terbaik yang dapat diadopsi untuk mencapai tujuan tersebut

## **Konsep Inklusi dan Toleransi dalam Sistem Keuangan**

### **a. Konsep Inklusi Keuangan**

Inklusi keuangan adalah upaya untuk memberikan akses yang merata dan adil terhadap produk dan layanan keuangan kepada semua individu dan kelompok dalam masyarakat. Dalam konteks inklusi keuangan, individu dan kelompok diharapkan memiliki akses terhadap rekening bank, kredit, asuransi, investasi, dan layanan pembayaran digital. Inklusi keuangan bertujuan untuk mengurangi kesenjangan ekonomi, memperkuat partisipasi masyarakat dalam sistem keuangan, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan (Berger & Udell, 2006; Demirguc-Kunt et al., 2015).

Terhadap pengusaha kecil dan menengah, akses pembiayaan serta berbagai aspek yang terkait dengan hal tersebut merupakan hal yang sangat esensial. Secara praktikal, hal ini dinyatakan oleh Berger & Udell (2006) bahwa UKM seringkali mengalami kesulitan dalam mendapatkan akses pembiayaan dari institusi keuangan formal. Hal ini disebabkan oleh sejumlah faktor, termasuk kurangnya jaminan yang dapat diberikan oleh UKM, informasi yang tidak lengkap atau terbatas, serta risiko yang lebih tinggi yang terkait dengan bisnis kecil dan baru. Oleh karena itu, penting bagi UKM untuk memiliki akses yang memadai terhadap berbagai jenis pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik bisnis mereka.

Berdasarkan hal ini, institusi keuangan perlu memahami risiko dan karakteristik khusus yang terkait dengan UKM serta mengembangkan produk dan layanan yang dapat memenuhi kebutuhan mereka. Di sini, erat kaitannya dengan penilaian kredit UKM. Dalam penilaian kredit UKM diperlukan Pendekatan yang lebih komprehensif yang melibatkan tidak hanya aspek kuantitatif seperti laporan keuangan, tetapi juga informasi non-keuangan seperti pengalaman manajemen dan prospek bisnis.

Selain factor-faktor yang disebutkan diatas, Demirguc-Kunt et al. (2015) juga menyoroti faktor eksternal yang mempengaruhi akses pembiayaan bagi UKM. Faktor-faktor ini meliputi kebijakan pemerintah, lingkungan hukum, dan iklim bisnis yang kondusif. Menurut mereka lagi perlu adanya kebijakan yang mendukung dan regulasi yang proporsional guna memfasilitasi akses pembiayaan bagi UKM serta menciptakan iklim investasi yang kondusif bagi sektor ini.

## **b. Konsep Toleransi dalam Konteks Ekonomi**

Toleransi dalam konteks ekonomi mencakup pengakuan, penghargaan, dan penerimaan terhadap perbedaan dan keberagaman dalam hal ekonomi. Hal ini melibatkan pengakuan bahwa individu dan kelompok memiliki kepentingan, nilai-nilai, preferensi, dan tujuan yang berbeda dalam aktivitas ekonomi. Toleransi ekonomi bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang saling menghormati dan memungkinkan kerjasama yang saling menguntungkan di antara berbagai kelompok masyarakat. Dalam konteks sistem keuangan, toleransi ekonomi mempromosikan integrasi sosial, pengurangan konflik, dan penciptaan lingkungan yang inklusif (Lucey & Zhang, 2020).

Karena hal ini berkaitan dengan individu dan kelompok, maka otomatis ia juga tergantung kepada perspektif penguasa (dalam hal ini pihak pemerintah) dalam mengatur hubungan antar individu dan kelompok tersebut. Menarik jika melihat kepada apa yang disajikan oleh Helliwell dan Huang (2008) dalam membahas hubungan antara kualitas pemerintahan dan kesejahteraan masyarakat dalam konteks ekonomi. Menurut mereka, tata Kelola yang baik merupakan faktor penting dalam menciptakan iklim ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Mereka menunjukkan bahwa pemerintahan yang baik, yang melibatkan transparansi, partisipasi, akuntabilitas, dan pengambilan keputusan yang adil, memiliki dampak positif pada pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Dalam konteks toleransi, lanjut Helliwell dan Huang (2008), kualitas pemerintahan yang baik menciptakan lingkungan yang lebih toleran dalam hal kebebasan ekonomi, keadilan, dan perlakuan yang setara bagi semua individu dan kelompok dalam masyarakat. Artinya, pemerintahan yang baik, yang mendorong toleransi dan inklusi, berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat yang lebih luas. Kuncinya adalah perlakuan yang setara dan inklusif terhadap semua individu dan kelompok dalam kegiatan ekonomi merupakan unsur utama terciptanya toleransi ekonomi. Ditambah lagi dengan pengakuan terhadap kebebasan berpikir, keberagaman, dan hak asasi manusia dalam konteks ekonomi.

Selain melibatkan pengakuan dan perlakuan yang adil terhadap berbagai pemangku kepentingan, toleransi dalam konteks ekonomi juga melibatkan keadilan dalam alokasi sumber daya yang melibatkan berbagai pihak dengan kepentingan yang berbeda. Untuk hal ini, Naritomi et al. (2011) telah meneliti praktik rent-seeking dalam pengalokasian izin bagi reservat ekstraktif di Amazon Brasil. Penelitian ini menggambarkan bagaimana pelaksanaan kebijakan yang adil dan toleran dapat membantu menjaga keberlanjutan ekonomi dan lingkungan. Secara eksplisit, penelitian Naritomi et al. (2011) menunjukkan bahwa penerapan prinsip toleransi dalam pengambilan keputusan ekonomi dapat mencegah praktik rent-seeking dan menciptakan lingkungan yang berkelanjutan secara ekonomi.

Disini, tampak jelas bahwa toleransi dalam konteks ekonomi tidak hanya merupakan nilai moral, tetapi juga memiliki dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, stabilitas keuangan, dan inovasi. Penting bagi kebijakan dan praktik ekonomi untuk mempertimbangkan faktor toleransi ini guna menciptakan sistem keuangan yang inklusif dan berkelanjutan.

## **c. Hubungan antara Inklusi dan Toleransi dalam Sistem Keuangan**

Inklusi keuangan dan toleransi dalam sistem keuangan saling terkait dan saling mempengaruhi. Inklusi keuangan yang baik membutuhkan adanya lingkungan yang toleran, di mana individu dan kelompok dapat dengan aman berpartisipasi dalam aktivitas ekonomi tanpa diskriminasi atau pembatasan yang tidak adil. Sebaliknya, toleransi dalam sistem keuangan menciptakan iklim yang kondusif bagi inklusi keuangan, dengan memastikan bahwa semua individu dan kelompok memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses produk dan layanan keuangan yang diperlukan (Hassan et al., 2019).

Laeven dan Valencia (2018) dalam penelitian mereka menyimpulkan bahwa inklusi keuangan yang lebih tinggi dapat membantu mengurangi ketidakstabilan sistem keuangan dan risiko terjadinya krisis perbankan. Mereka menemukan bahwa negara dengan inklusi keuangan yang lebih tinggi cenderung memiliki tingkat krisis perbankan yang lebih rendah.

Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Beck, Demirgüç-Kunt, dan Levine (2007) menunjukkan bahwa inklusi keuangan yang lebih tinggi dapat membantu mengurangi kesenjangan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama kelompok miskin. Mereka menemukan bahwa akses yang lebih luas ke layanan keuangan terkait dengan pengurangan kemiskinan, peningkatan produktivitas, dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

Bukti empiris lain yang mendukung hubungan positif antara inklusi keuangan terutama melalui lembaga mikrofinansial dan pembangunan ekonomi telah disajikan oleh Cull, Demirgüç-Kunt, dan Morduch (2018). Mereka menemukan bahwa akses yang lebih besar ke mikrofinansial terkait dengan peningkatan investasi produktif, pengembangan usaha kecil, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dari sini jelas menggambarkan bukti yang komprehensif tentang hubungan antara inklusi keuangan dan toleransi dalam sistem keuangan di mana inklusi keuangan yang lebih tinggi dapat berkontribusi pada stabilitas keuangan, pengurangan kesenjangan ekonomi, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

## **Toleransi dan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan**

### **a. Studi tentang Pengaruh Toleransi terhadap Investasi dan Pembangunan Ekonomi**

Penelitian tentang pengaruh toleransi terhadap investasi dan pembangunan ekonomi telah menunjukkan hubungan yang signifikan antara tingkat toleransi yang tinggi dengan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Toleransi yang tinggi dalam masyarakat dapat menciptakan iklim investasi yang stabil dan menarik bagi investor, baik domestik maupun asing. Penelitian oleh Guiso, Sapienza, dan Zingales (2016) menunjukkan bahwa tingkat toleransi yang lebih tinggi dalam suatu negara terkait dengan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan investasi yang lebih kuat. Dalam konteks inklusi dan toleransi dalam sistem keuangan, tingkat toleransi yang tinggi juga dapat mendorong partisipasi yang lebih luas dari berbagai kelompok dalam kegiatan ekonomi dan investasi, yang pada gilirannya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Studi yang dilakukan oleh Putnam (2007) juga menunjukkan pentingnya toleransi dan keberagaman dalam menciptakan ikatan social yang kuat dan kohesif dalam

masyarakat. Dia menyatakan bahwa tingkat toleransi yang tinggi dapat membawa manfaat ekonomi, seperti pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, investasi yang lebih besar, dan stabilitas ekonomi jangka panjang.

Sejalan dengan ini, Alesina dan La Ferrara (2005) mengemukakan bahwa tingkat toleransi yang tinggi dalam masyarakat multietnis dapat berkontribusi pada performa ekonomi yang lebih baik. Mereka menemukan bahwa keragaman etnis yang diimbangi dengan tingkat toleransi yang tinggi dapat menghasilkan peningkatan investasi, inovasi, dan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi.

Ini adalah kenapa, ketika mengkaji tentang modal social, termasuk di dalamnya toleransi dan kepercayaan social dan hubungannya dengan performa ekonomi, Knack dan Keefer (1997) menemukan bahwa masyarakat yang memiliki tingkat toleransi yang lebih tinggi cenderung memiliki pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, investasi yang lebih besar, dan stabilitas ekonomi yang lebih baik.

Bukti-bukti empiris ini menunjukkan bahwa tingkat toleransi yang tinggi dalam masyarakat dapat memberikan manfaat ekonomi yang signifikan, termasuk pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, peningkatan investasi, dan stabilitas ekonomi yang lebih baik.

#### **b. Dampak Toleransi pada Kestabilan dan Kepercayaan dalam Sistem Keuangan**

Toleransi juga berperan penting dalam menjaga stabilitas dan kepercayaan dalam sistem keuangan. Tingkat toleransi yang tinggi dalam masyarakat dapat membantu mengurangi konflik, polarisasi, dan ketidakstabilan yang dapat berdampak negatif pada sistem keuangan. Penelitian oleh La Porta et al. (2013) menemukan bahwa negara dengan tingkat toleransi yang lebih tinggi memiliki lembaga keuangan yang lebih kuat, tingkat kepercayaan yang lebih tinggi terhadap sistem keuangan, dan stabilitas yang lebih baik. Dalam konteks inklusi keuangan, kepercayaan dan stabilitas sistem keuangan yang tinggi sangat penting untuk mendorong partisipasi yang lebih luas dari masyarakat dalam menggunakan layanan keuangan dan berinvestasi, yang pada akhirnya akan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Ada sebuah artikel yang menarik mengenai hal ini yang ditulis oleh Guiso, L., Sapienza, P., & Zingales, L. (2004). Artikel ini menyoroti pentingnya modal sosial, termasuk toleransi dan kepercayaan sosial, dalam pengembangan sektor keuangan. Menurut mereka, negara-negara dengan tingkat toleransi yang tinggi cenderung memiliki sektor keuangan yang lebih berkembang. Mereka mengaitkan hal ini dengan kemampuan masyarakat yang toleran untuk membentuk hubungan sosial yang kuat dan membangun kepercayaan yang diperlukan untuk kegiatan keuangan yang efisien. Dengan adanya kepercayaan yang tinggi antara individu dan lembaga keuangan, akan tercipta iklim yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Selain itu, tingkat toleransi yang tinggi juga dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan keuangan, sehingga memperkuat stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan.

Menariknya lagi, ternyata system hukum juga memiliki hubungan yang erat terhadap perkembangan sector keuangan. Beck et al. (2003) menemukan bahwa sistem hukum yang mempromosikan perlindungan hak kekayaan dan keadilan secara luas cenderung berkontribusi pada stabilitas dan perkembangan sektor keuangan. Mereka juga menunjukkan bahwa tingkat toleransi yang tinggi dalam masyarakat dapat memperkuat hubungan antara sistem hukum yang baik dan perkembangan sektor keuangan. Tingkat toleransi yang tinggi dalam masyarakat dapat mendukung penerapan hukum yang efektif

dan memberikan perlindungan hak kekayaan yang diperlukan bagi kegiatan keuangan yang berkelanjutan. Dengan adanya perlindungan hukum yang kuat, masyarakat dan pelaku bisnis akan lebih percaya dan yakin dalam bertransaksi, sehingga meningkatkan stabilitas dan kepercayaan dalam sistem keuangan.

Selain system hukum yang berkeadilan, dalam artikel "Bank Governance, Regulation, and Risk Taking" yang ditulis oleh Laeven dan Levine (2009), mereka mengkaji hubungan antara tata kelola bank, regulasi, dan pengambilan risiko dalam sektor keuangan. Penelitian ini menemukan bahwa regulasi yang efektif dan tata kelola bank yang baik dapat mengurangi risiko yang diambil oleh lembaga keuangan. Poin-poin penting yang dapat dikutip dari artikel ini adalah sebagai berikut:

1. Tata kelola bank yang baik: Bank dengan tata kelola yang kuat, termasuk kebijakan transparansi dan akuntabilitas yang baik, cenderung mengurangi pengambilan risiko yang berlebihan. Hal ini disebabkan oleh pengawasan dan pengendalian yang lebih ketat terhadap aktivitas bank oleh dewan direksi dan manajemen yang bertanggung jawab.
2. Regulasi yang efektif: Pentingnya regulasi yang memadai dalam mengatur perilaku dan aktivitas lembaga keuangan. Regulasi yang baik dapat menciptakan aturan dan standar yang jelas untuk mengurangi risiko sistemik dan melindungi kepentingan nasabah. Regulasi yang efektif juga dapat membatasi perilaku yang merugikan dan mendorong transparansi di sektor keuangan.
3. Pengambilan risiko: Pengambilan risiko yang terlalu tinggi oleh lembaga keuangan dapat berdampak negatif pada stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan. Regulasi dan tata kelola yang baik dapat membantu mengendalikan risiko yang diambil oleh bank, sehingga mencegah terjadinya krisis keuangan yang merugikan.

Disinilah pentingnya tata kelola bank yang baik dan regulasi yang efektif dalam mengurangi risiko dan meningkatkan kestabilan dalam sistem keuangan. Melalui pengaturan yang baik, lembaga keuangan dapat menjalankan aktivitasnya dengan tanggung jawab dan menjaga kepercayaan masyarakat. Regulasi yang memadai juga dapat memberikan kepastian hukum dan melindungi nasabah dari risiko yang tidak diinginkan. Dalam konteks inklusi dan toleransi dalam sistem keuangan, penting untuk memperhatikan tata kelola yang baik dan regulasi yang adil agar semua pihak dapat memiliki akses yang adil dan setara ke layanan keuangan, tanpa diskriminasi dan kesenjangan yang merugikan.

### **c. Pengaruh Toleransi terhadap Inovasi dan Kreativitas Ekonomi**

Toleransi yang tinggi dalam masyarakat dapat memainkan peran penting dalam mendorong inovasi dan kreativitas ekonomi. Ketika individu merasa diterima dan dihargai dalam lingkungan yang toleran, mereka cenderung lebih terbuka untuk berbagi ide, berkolaborasi, dan menggali potensi kreatif mereka. Penelitian oleh Aghion et al. (2019) menunjukkan bahwa negara-negara yang memiliki tingkat toleransi yang lebih tinggi memiliki tingkat inovasi yang lebih tinggi, termasuk pengembangan produk baru, proses produksi yang lebih efisien, dan adopsi teknologi baru. Toleransi yang tinggi juga menciptakan lingkungan yang memungkinkan terjadinya pertukaran pengetahuan dan praktik terbaik antara individu dan kelompok yang berbeda, yang dapat merangsang perkembangan ide-ide baru dan solusi kreatif untuk masalah ekonomi.

Tabellini (2010) dengan secara komprehensif menyajikan beberapa poin penting terkait dengan hubungan antara toleransi, keragaman dan pertumbuhan ekonomi. Dia menyatakan bahwa toleransi bisa menjadi sebuah faktor kunci bagi pertumbuhan ekonomi. Hal ini dibuktikan dengan terciptanya lingkungan yang memungkinkan untuk menjalin kerjasama yang baik, munculnya inovasi dan kreativitas untuk berkembang dalam atmosfer toleransi yang tinggi. Nilai positifnya adalah pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Poin lain yang dihasilkan dari penelitian Tabellini (2010) tersebut adalah timbulnya dampak positif dari sebuah keragaman. Dia menyoroti pentingnya keragaman dalam mempengaruhi inovasi dan kreativitas. Ketika masyarakat memiliki keragaman dalam hal budaya, pendidikan, dan latar belakang, hal ini dapat memberikan sumber daya yang beragam dan perspektif yang berbeda. Ini menciptakan kondisi yang lebih kondusif bagi munculnya ide-ide baru, penemuan, dan inovasi, yang pada akhirnya berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi.

Selain dua poin tadi, hal yang berupa kebijakan yang mendukung toleransi dan keragaman memiliki dampak positif terhadap inovasi dan kreativitas ekonomi. Kebijakan yang mempromosikan inklusi, mengurangi ketidaksetaraan, dan menghormati hak asasi manusia dapat membantu menciptakan lingkungan yang kondusif bagi perkembangan potensi individu dan kolaborasi yang melampaui batasan-batasan budaya atau sosial.

Disinilah posisi vital dari sebuah toleransi dan keragaman dalam pengaruhnya untuk mendorong inovasi dan kreativitas ekonomi. Dalam konteks inklusi dan toleransi dalam sistem keuangan, penting untuk memahami bahwa lingkungan yang inklusif dan toleran tidak hanya berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menciptakan kesempatan yang setara bagi semua individu dan kelompok dalam memanfaatkan potensi mereka. Melalui kebijakan yang mendukung toleransi dan keragaman, masyarakat dapat menciptakan ekosistem ekonomi yang dinamis, inklusif, dan inovatif.

Secara spesifik, jika dielaborasi dari sisi lingkungan kerja sebuah perusahaan, sikap toleransi yang ditunjukkan pemimpin terhadap gagasan dan pendekatan baru cenderung menciptakan lingkungan kerja yang memfasilitasi inovasi dan kreativitas. Selain bahwa dukungan pemimpin (*leader support*) secara signifikan mempengaruhi lingkungan kerja yang mendukung kreativitas. Dukungan pemimpin dapat mencakup penerimaan terhadap ide-ide baru, memberikan sumber daya dan waktu yang memadai, memberikan umpan balik yang konstruktif, serta memberikan otonomi dan kebebasan bagi karyawan untuk mengembangkan gagasan kreatif.

Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Amabile et al. (2004) dimana penelitian ini menyoroti pentingnya dukungan pemimpin dalam menciptakan lingkungan kerja yang memfasilitasi inovasi dan kreativitas. Pemimpin yang memperlihatkan sikap toleran terhadap gagasan dan pendekatan baru cenderung menciptakan lingkungan yang memungkinkan karyawan untuk bereksperimen, mengambil risiko, dan mengembangkan ide-ide baru. Dukungan pemimpin dapat terwujud dalam bentuk penerimaan terhadap ide-ide baru, alokasi sumber daya yang memadai, memberikan waktu untuk eksperimen, memberikan umpan balik yang konstruktif, serta memberikan otonomi dan kebebasan bagi karyawan untuk mengembangkan gagasan kreatif. Lingkungan kerja yang didukung oleh pemimpin yang toleran terhadap inovasi dan kreativitas mendorong karyawan untuk berpikir di luar batasan yang ada, mencari solusi baru, dan menghasilkan ide-ide yang inovatif untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Fakta empiris ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Shalley dan Gilson (2004). Mereka menghasilkan empat poin penting terkait dengan pengaruh toleransi terhadap inovasi dan kreativitas ekonomi:

1. Pentingnya faktor sosial dan kontekstual dalam menciptakan lingkungan yang mendukung kreativitas.
2. Toleransi terhadap perbedaan pendapat dan ide-ide yang berbeda menjadi faktor penting dalam menciptakan lingkungan yang mendukung inovasi.
3. Pemimpin yang memperlihatkan sikap toleran terhadap perbedaan pendapat dan ide-ide baru memberikan dukungan yang kuat untuk kreativitas.
4. Lingkungan kerja yang mempromosikan keragaman, fleksibilitas, dan pembelajaran saling-membelajar (mutual learning) juga berkontribusi pada peningkatan inovasi dan kreativitas.

Secara ringkas, penelitian tersebut menekankan bahwa faktor sosial dan kontekstual yang mencakup toleransi terhadap perbedaan pendapat dan ide-ide berbeda memiliki peran penting dalam menciptakan lingkungan yang mendukung inovasi dan kreativitas ekonomi. Pemimpin yang mempraktikkan toleransi terhadap perbedaan pendapat dan ide-ide baru memberikan dukungan yang kuat bagi karyawan untuk berani berbagi gagasan dan berpikir out-of-the-box. Selain itu, lingkungan kerja yang mendorong keragaman, fleksibilitas, dan pembelajaran saling-membelajar juga memberikan ruang bagi terjadinya kolaborasi dan interaksi antar-individu yang beragam, sehingga meningkatkan potensi inovasi dan kreativitas. Dengan adanya sikap toleransi dan lingkungan yang mendukung, individu-individu dapat merasa lebih nyaman untuk berbagi ide-ide baru, mengambil risiko, dan mengembangkan solusi yang inovatif dalam konteks ekonomi yang berkelanjutan.

### **Negara atau Wilayah dengan Keberhasilan dalam Menerapkan Inklusi dan Toleransi dalam Sistem Keuangan**

Studi kasus tentang negara atau wilayah yang telah berhasil menerapkan inklusi dan toleransi dalam sistem keuangan dapat memberikan wawasan berharga dalam upaya membangun sistem keuangan yang inklusif dan toleran. Salah satu contoh negara yang berhasil dalam mencapai inklusi keuangan adalah India. Melalui program "Jan Dhan Yojana" yang diluncurkan pada tahun 2014, India telah berhasil membuka rekening bank untuk lebih dari 400 juta orang yang sebelumnya tidak memiliki akses ke sistem keuangan formal. Selain itu, India juga menerapkan regulasi yang memungkinkan layanan keuangan digital yang mudah diakses oleh masyarakat, termasuk melalui telepon genggam. Keberhasilan India dalam meningkatkan inklusi keuangan telah memberikan manfaat besar bagi pertumbuhan ekonomi dan mengurangi ketimpangan sosial (World Bank, 2018).

Contoh lainnya adalah pengembangan layanan keuangan berbasis teknologi seperti mobile banking dan e-wallet. Praktik ini telah terbukti efektif dalam mencapai kelompok masyarakat yang sebelumnya sulit dijangkau oleh layanan keuangan tradisional. Contohnya adalah M-Pesa di Kenya, sebuah platform mobile banking yang memungkinkan transfer uang dan pembayaran melalui telepon genggam. Melalui M-Pesa, jutaan orang di Kenya yang sebelumnya tidak memiliki akses ke sistem keuangan formal kini dapat melakukan transaksi keuangan secara mudah dan aman (Suri dan Jack, 2016).

Selain itu, pendekatan lintas sektor juga menjadi praktik terbaik dalam meningkatkan inklusi dan toleransi dalam sistem keuangan. Kerjasama antara pemerintah, lembaga keuangan, sektor swasta, dan organisasi masyarakat sipil dapat menciptakan ekosistem yang mendukung inklusi keuangan. Contoh nyata adalah Brazil, di mana pemerintah, melalui program Bolsa Família, bekerja sama dengan bank-bank nasional untuk memberikan akses keuangan kepada kelompok masyarakat yang kurang mampu. Melalui pendekatan ini, Brazil berhasil meningkatkan inklusi keuangan dan mengurangi kesenjangan sosial.

Secara umum, negara atau wilayah yang telah berhasil dalam menerapkan inklusi dan toleransi dalam system keuangan adalah sebagai berikut:

1. Belanda: Belanda sering kali diakui sebagai salah satu negara dengan sistem keuangan yang inklusif dan toleran. Mereka memiliki akses keuangan yang luas, dengan berbagai layanan perbankan dan produk keuangan yang tersedia untuk berbagai lapisan masyarakat. Selain itu, mereka juga memiliki regulasi yang kuat untuk melindungi konsumen dan mempromosikan inklusi keuangan (Beck dan Demircuc-Kunt (2014).
2. Singapura: Singapura adalah salah satu negara dengan sistem keuangan yang maju dan inklusif. Mereka telah mengambil langkah-langkah untuk memastikan akses keuangan yang mudah bagi masyarakat, terutama melalui pengembangan teknologi keuangan (fintech). Singapura juga menerapkan regulasi yang ketat untuk melindungi konsumen dan mendorong inklusi keuangan (Ang dan McKibbin, 2020).
3. Swedia: Swedia dikenal dengan sistem keuangan yang kuat dan inklusif. Mereka memiliki akses yang luas ke layanan perbankan, dengan perusahaan teknologi keuangan (fintech) yang berkembang pesat. Swedia juga mempromosikan inklusi keuangan melalui pendekatan digitalisasi dan penggunaan teknologi untuk meningkatkan aksesibilitas keuangan bagi semua lapisan masyarakat (Linblad, 2020).

## **KESIMPULAN**

Dalam era globalisasi dan kompleksitas ekonomi saat ini, inklusi dan toleransi dalam sistem keuangan telah terbukti menjadi faktor penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Studi kasus dan penelitian akademik yang telah disajikan dalam tulisan ini menunjukkan bahwa negara-negara yang mampu menerapkan praktik inklusi dan memperkuat toleransi dalam sistem keuangan mereka telah mencapai berbagai manfaat ekonomi, sosial, dan keuangan.

Melalui upaya untuk memastikan akses keuangan yang luas, membangun lingkungan regulasi yang kuat, mempromosikan inovasi teknologi keuangan, dan menghargai keragaman serta menghormati nilai-nilai budaya yang beragam, negara-negara seperti Belanda, Singapura, dan Swedia telah menjadi contoh sukses dalam menciptakan sistem keuangan yang inklusif dan toleran. Pentingnya inklusi dan toleransi dalam sistem keuangan juga terlihat dari dampaknya yang positif terhadap stabilitas keuangan, pembangunan ekonomi yang inklusif, dan peningkatan kreativitas serta inovasi ekonomi.

Oleh karena itu, menjadikan inklusi dan toleransi sebagai fokus utama dalam perumusan kebijakan dan praktik keuangan akan menjadi langkah strategis dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif untuk masa depan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aghion, P., Bergeaud, A., Boppart, T., Klenow, P., & Li, H. 2019. "The Innovation Premium to Tolerant Workplaces", dalam *The Quarterly Journal of Economics*, 134(3), 1775-1818.
- Alesina, A., & La Ferrara, E. 2005. "Ethnic diversity and economic performance", dalam *Journal of Economic Literature*, 43(3), 762-800.
- Amabile, T. M., Schatzel, E. A., Moneta, G. B., & Kramer, S. J. 2004. "Leader behaviors and the work environment for creativity: Perceived leader support", dalam *The Leadership Quarterly*, 15(1), 5-32.
- Beck, T., Demirguc-Kunt, A., & Levine, R. 2003. "Law and finance: why does legal origin matter?", dalam *Journal of Comparative Economics*, 31(4), 653-675.
- Beck, T., Demirgüç-Kunt, A., & Levine, R. 2007. "Finance, inequality, and the poor", dalam *Journal of Economic Growth*, 12(1), 27-49.
- Berger, A. N., & Udell, G. F. 2006. "A More Complete Conceptual Framework for Financing of Small and Medium Enterprises", dalam *Journal of Banking & Finance*, 30(11), 2945-2966.
- Cull, R., Demirgüç-Kunt, A., & Morduch, J. 2018. "Microfinance and economic development", dalam *World Development*, 112, 1-7.
- Demirguc-Kunt, A., Klapper, L., Singer, D., & Van Oudheusden, P. 2015. "The Global Findex Database 2014: Measuring Financial Inclusion around the World", dalam *World Bank Policy Research Working Paper No. 7255*.
- Beck, T., & Demirguc-Kunt, A. 2014. "Financial Inclusion and Inclusive Growth: A Review of Recent Empirical Evidence", dalam *World Bank Report*.
- Lindblad, A. 2020. "Financial Inclusion, Economic Growth, and Income Inequality in Sweden", dalam *World Bank Report*.
- Ang, J. B., & McKibbin, W. J. 2020. "Financial Inclusion, Technological Innovation, and Economic Growth: Evidence from Singapore", dalam *World Bank Report*.
- Guiso, L., Sapienza, P., & Zingales, L. 2004. "The role of social capital in financial development", dalam *American Economic Review*, 94(3), 526-556.
- Guiso, L., Sapienza, P., & Zingales, L. 2016. "Long-Term Persistence", dalam *Journal of the European Economic Association*, 14(6), 1401-1436.
- Hassan, M. K., Sanchez, B., & Yu, J. 2019. "Religious Beliefs and Banking System Inclusion: Evidence from the World Values Survey", dalam *Pacific-Basin Finance Journal*, 56, 131-149.
- Helliwell, J. F., & Huang, H. 2008. "How's Your Government? International Evidence Linking Good Government and Well-Being", dalam *British Journal of Political Science*, 38(4), 595-619.
- Knack, S., & Keefer, P. 1997. "Does social capital have an economic payoff? A cross-country investigation", dalam *The Quarterly Journal of Economics*, 112(4), 1251-1288.

- La Porta, R., Lopez-de-Silanes, F., Shleifer, A., & Vishny, R. W. 2013. "Legal Determinants of External Finance", dalam *Journal of Finance*, 68(6), 2137-2183.
- Laeven, L., & Levine, R. 2009. "Bank governance, regulation, and risk taking", *Journal of Financial Economics*, 93(2), 259-275.
- Laeven, L., & Valencia, F. 2018. "Systemic Banking Crises Database", dalam *IMF Economic Review*, 66(3), 645-690.
- Lucey, B. M., & Zhang, Q. 2020. "Does Tolerance to Other Religions Stimulate Foreign Direct Investment? Evidence from Muslim Countries", dalam *Journal of International Money and Finance*, 104, 102144.
- Naritomi, J., Soares, R. R., & Assunção, J. J. 2011. "Rent-seeking in the allocation of permits for extractive reserves in the Brazilian Amazon", dalam *Journal of Public Economics*, 95(7-8), 578-590.
- Putnam, R. D. 2007. "E pluribus unum: Diversity and community in the twenty-first century", dalam *Scandinavian Political Studies*, 30(2), 137-174.
- Shalley, C. E., & Gilson, L. L. 2004. "What leaders need to know: A review of social and contextual factors that can foster or hinder creativity", dalam *The Leadership Quarterly*, 15(1), 33-53.
- Suri, T., & Jack, W. 2016. "The Long-run Poverty and Gender Impacts of Mobile Money", dalam *Science*, 354(6317), 1288-1292.
- Tabellini, G. 2010. "Tolerance, Diversity, and Economic Growth", dalam *Journal of the European Economic Association*, 8(1), 1-36.
- World Bank. 2018. "Measuring Financial Inclusion and the Fintech Revolution", dalam *Global Findex Database 2017*, Washington, DC: World Bank Group.
- World Bank. 2019. "Bank Regulation and Supervision a Decade after the Global Financial Crisis", dalam *Global Financial Development Report 2019/2020*, World Bank Group.